

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI PENELITIAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan penelitian menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat dirumuskan dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang yang dinilai dengan pendekatan *Value For Money* menunjukkan bahwa:
 - a. Capaian kinerja secara fisik 100% dan realisasi anggaran diatas 95% dinilai kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil dan dianggap bahwa kinerja kegiatan dinilai baik.
 - b. Dalam penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran terdapatnya ketidakselarasan antara Rencana Strategis dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Ketidakselarasan ini mengakibatkan penetapan indikator dan target kinerja setiap tahun yang berbeda sehingga kinerja BPMPKB tidak bisa diukur atau dinilai untuk periode 2013 sampai 2015 dan tidak bisa dibandingkan bagaimana capaian setiap tahunnya.
 - c. Dalam penentuan indikator *output* dan *outcome* terhadap program dan kegiatan pada penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdapat pemahaman yang berbeda oleh pejabat struktural tentang pengertian *output* dan *outcome*.
 - d. Realisasi program BPMPKB pada ketiga urusannya dari sudut ekonomis tahun 2013 10 program tergolong ekonomis, dan 1 program tergolong cukup ekonomis. Tahun 2014 7 program dinilai ekonomis dan 5 program dinilai cukup ekonomis. Sementara di tahun 2015 12 program dinilai ekonomis.
 - e. Realisasi program BPMPKB pada ketiga urusannya dari sudut efisiensi tahun 2013 9 program dinilai efisien dan 2 program dinilai tidak efisien. Tahun 2014 1 program dinilai sangat efisien, 5 program dinilai efisien, 5 program dinilai cukup efisien dan 1 program dinilai tidak efisien.

- f. Tahun 2015 1 program sangat efisien, 6 program dinilai efisien, 1 program dinilai cukup efisien dan 4 program dinilai tidak efisien
- g. Realisasi program BPMPKB pada ketiga urusannya dari sudut efektifitas tahun 2013 10 program dinilai efektif dan 1 program dinilai kurang efektif. Tahun 2014 10 program dinilai efektif, 2 program dinilai kurang efektif. Tahun 2015 10 program dinilai efektif, 1 program dinilai cukup efektif dan 1 program dinilai kurang efektif.
2. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang yang dinilai dengan pendekatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang menunjukkan bahwa:
- Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada 3 indikator kinerja kunci yang dilaporkan sedangkan dalam lampiran PP nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat 6 IKK. 3 IKK yang dilaporkan tersebut bukan berasal dari BPMPKB melainkan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan. Sedangkan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dari 3 IKK dalam PP nomor 6 tahun 2008 hanya 1 IKK yang dilaporkan dan ditambah dengan IKK lainnya. Dan pada urusan pemberdayaan masyarakat desa dari 4 IKK dalam PP nomor 6 tahun 2008 hanya 2 IKK yang disajikan.
 - BPMPKB tidak melakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga kinerja BPMPKB dengan pendekatan EKPPD sulit diukur karena tidak semua data dan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan pengukuran kinerja lebih dominan pada realisasi anggaran.
 - Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan KB dan KS, dan Pemberdayaan Masyarakat dapat memberikan informasi yang sesuai dengan IKK untuk EKPPD namun kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sulit sekali memperoleh informasi untuk IKK karena pemenuhan informasi ini berasal dari dinas lain yaitu dinas pendidikan dan dinas sosial dan tenaga kerja.

B. Implikasi Penelitian

Dengan mengetahui ketidakselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengakibatkan kinerja BPMPKB sulit atau tidak bisa diukur diharapkan pihak BPMPKB agar dapat memahami perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja dapat dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis BPMPKB dan pengukuran kinerja dapat dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja terdiri dari empat tahap yaitu:

1. Penentuan Visi, misi, tujuan serta strategi.
2. Penerjemahan visi, misi, dan tujuan serta strategi ke dalam sasaran strategik, inisiatif strategik, indikator kinerja (*input, output, outcome, benefit, impact*), dan target kinerja.
3. Penyusunan program
4. Penyusunan anggaran

Sementara itu kerangka pengukuran kinerja *Value for Money* dibangun atas tiga komponen utama yaitu:

1. Komponen visi, misi, tujuan sasaran dan target
2. Komponen *input, output* dan *outcome*
3. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektifitas

Dalam menyusun program dan kegiatan harus menggambarkan sasaran strategik, indikator kinerja dan target kinerja sehingga akan memudahkan dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja yang ditetapkan tidak hanya indikator *input, output* dan *outcome* saja melainkan juga Indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKU sebagai patokan keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang perlu disusun, diantaranya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kerja perangkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan menilai capaian seperangkat indikator kinerja kunci (IKK) untuk setiap urusan yang dibebankan kepada masing-masing daerah. Capaian setiap

indikator kinerja kunci untuk ketiga urusan di BPMPKB tersebut akan menunjukkan seberapa jauh Kota Padang mampu melaksanakan urusan yang didelegasikan kepadanya.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas, saran di ajukan yang mudah-mudahan dapat dilaksanakan untuk menilai kinerja di masa datang yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Padang yang saat ini telah berganti nama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) harus melakukan revisi terhadap rencana strategis yang mana dalam revisi Renstra tersebut menetapkan kembali visi, misi, tujuan, sasaran dan target kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja program dan kegiatan yang jelas sehingga nantinya memudahkan dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus mengacu pada Rencana Strategis yang disusun maka terbentuklah keselarasan antara Renstra dan LAKIP sehingga akan menghasilkan nilai AKIP yang baik.
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran hal utama yang harus diperhatikan adalah penetapan indikator *output* dan *outcome* yang jelas terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga nantinya dalam pengukuran kinerja ataupun penilaian *ekonomi*, *efisiensi* dan *efektifitas* dapat terukur dengan baik.
3. Penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan IKK pada PP nomor 6 Tahun 2008.
4. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi perangkat daerah saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

5. Bagi para peneliti yang berminat tentang pengukuran ataupun penilaian kinerja perangkat daerah penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan inspirasi untuk meneliti lebih dalam kinerja suatu perangkat daerah. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengimplikasikan penelitian ini lebih spesifik dengan membedakan atau mengelompokkan antara perusahaan dengan sektor publik.

